

Peran *United Nations Children's Fund (Unicef)* dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Papua Tahun 2020-2021

Winda Indriani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
E-mail : windaindriani98@gmail.com

Abstract

This research aim to identify and describe the role of international organization United Nations Children's Fund (UNICEF) in improving the quality of education in Papua in 2020-2021. The research used a descriptive method with secondary data, was collected through literature such as journals, documents and the internet, and used qualitative data analysis techniques. This research used the theory of the role of international organizations from Clive Archer to explain the research questions. The results of this research, the condition of education in Papua is a complex problem, which is related to various factors that make education very lagging. Starting from high poverty levels, uneven implementation of the curriculum, limited teachers, limited schools, diverse socio-cultures, relatively high illiteracy rates, lack of enrollment of the population who are currently in school and increasing dropout rates, this situation makes the Human Development Index (HDI) low. Efforts have been made by the local government, but there are still challenges in improving the quality of education in Papua. As an international organization that focuses on the protection and welfare of children around the world, UNICEF performs its role as an international organizational actor by running the rural and remote education initiative for Papuan Provinces.

Keywords: *Quality Education, Papua, UNICEF*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dengan pendidikan dapat menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual dan dapat berpikir secara saintifik sehingga mampu menumbuhkan sifat spiritualnya (Safitri et. al,2022). Oleh karena itu, pendidikan mempengaruhi tingkat kualitas suatu negara dalam membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang akan memiliki peranan mendorong kemajuan bangsa. Sehingga, negara-negara di dunia terus berupaya menerapkan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan pendidikan dengan harapan menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dan dapat menjadi pelaku kehidupan global (Sapardan, 2020:1).

Demikian pula dengan Indonesia terus berupaya memajukan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam sistem pendidikan, masyarakat Indonesia wajib mengikuti Program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Program ini dijalankan melalui jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan bentuk lain yang sederajat, selanjutnya jenjang pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lainnya. Melalui jalur pendidikan nonformal seperti, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pendidikan nonformal lainnya. Dan melalui jalur pendidikan informal yang dimulai dari keluarga, orang-orang terdekat serta lingkungan sekitar (Triyono, 2019:17).

Setelah mampu meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi tantangan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hasil studi dan asesmen menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia belum memuaskan. Berdasarkan hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2018 yang menunjukkan bahwa capaian kemampuan siswa Indonesia usia 15 tahun untuk membaca, matematika, dan sains berada di bawah rata-rata negara *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Yang lebih memprihatinkan, dari ketiga bidang yang diujikan, hasil kemampuan membaca pada PISA 2018 ini menurun di titik semula seperti hasil PISA 2000 (Pratiwi, 2019). Kemampuan membaca, matematika dan sains merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan kemampuan dasar pendidikan, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Masih adanya masyarakat yang tidak dapat memperoleh pendidikan dikarenakan kemiskinan. Tidak semua masyarakat di Indonesia lepas dari kemiskinan sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan pada penduduk miskin membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Mereka cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Provinsi Papua menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2020, terdapat 8 dari 29 kabupaten/kota di Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan memiliki banyak penduduk miskin. Tingginya tingkat kemiskinan di Papua berdampak signifikan terhadap pendidikan. Kondisi kemiskinan membuat banyak anak-anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan yang layak, seperti sarana dan prasarana sekolah serta buku pelajaran. Biaya pendidikan juga menjadi kendala bagi sebagian besar keluarga miskin di Papua sehingga tidak sedikit anak-anak putus sekolah akibat faktor keuangan dan kemiskinan (BPS, 2020).

Tingginya tingkat kemiskinan mempengaruhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan setidaknya kemampuan dasar mereka dalam membaca dan menulis. Namun, faktanya di Papua jumlah siswa yang tidak dapat membaca sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian UNICEF menemukan bahwa 57% siswa di Kabupaten Asmat dan 25% di Kabupaten Nabire tidak dapat membaca. Hanya 20% siswa di Kabupaten Asmat yang dapat membaca serta memahami konteks bacaan dan dari jumlah tersebut, hanya 2% yang dapat membaca dengan lancar. Di Kabupaten Nabire, 35% siswa dapat membaca serta memahami konteks bacaan dan 20% siswa dapat membaca dengan

lancar (UNICEF, 2022). Menurut penelitian Gea (2022), masih banyak masyarakat yang belum dapat membaca dengan baik, tidak hanya di sekolah dasar tetapi juga di satuan pendidikan menengah, seperti SMA Negeri 1 Oksibil, di mana panitia menyeleksi siswa baru dengan kegiatan membaca dan menulis, sejumlah siswa belum mahir membaca dan beberapa siswa masih mengeja.

Selain itu, Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua termasuk yang terendah di Indonesia. Di provinsi tersebut terdapat ketimpangan antara kelompok sosial ekonomi, penduduk perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat adat dan non-pribumi. Ketidaksetaraan terkonsentrasi di dataran tinggi dimana sebagian besar penduduknya adalah masyarakat adat. Anak-anak masyarakat adat di daerah pedesaan dan terpencil masih sangat kurang beruntung dan hampir 50% anak usia di atas 5 tahun di daerah pedesaan di provinsi Papua tidak pernah bersekolah, dibandingkan dengan 5% di daerah perkotaan (SDKI, 2012).

Kesempatan pendidikan hanya sedikit berkembang di Papua dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) 2011 dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, masih terdapat ketimpangan yang cukup besar di Papua berdasarkan distribusi geografis, tingkat kesejahteraan, perkotaan versus pedesaan, dan penduduk asli versus non-pribumi. Secara umum, anak-anak di daerah pedesaan menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan pendidikan yang efektif, rendahnya angka partisipasi siswa kemungkinan besar terkait dengan kurangnya pengetahuan pedagogis para guru, kualitas pengajaran yang buruk dan hukuman fisik, serta rendahnya rasa hormat siswa dan orang tua terhadap sekolah.

United Nations Children's Fund (UNICEF) adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjamin hak setiap anak, terutama yang paling rentan, memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam kehidupan. Dengan demikian, UNICEF mendukung inisiatif pemerintah Indonesia untuk menghapus ketimpangan dalam sektor pendidikan di Provinsi Papua. Dalam menjalankan kegiatannya, UNICEF dan Indonesia melakukannya dengan merancang sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Country Programme Action Plan*. CPAP merupakan kerja sama Indonesia-UNICEF dengan program kegiatan yang akan diperbarui setiap lima tahun sekali. Memiliki tujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan utama kesejahteraan anak. (UNICEF, 2020). Melalui program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* merupakan program UNICEF untuk pendidikan daerah pedesaan dan terpencil di Papua.

KERANGKA TEORI

Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah bentuk formal pengaturan kerja sama internasional antar negara. Organisasi internasional, menurut Karen Mingst, adalah kelompok internasional yang didirikan oleh negara-negara dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Menurut A Lee Roy Bennet, organisasi internasional adalah suatu jenis kerja sama internasional yang dilembagakan antar negara, yang dicirikan oleh keanggotaan yang permanen, terbuka, dan sukarela, instrumen dasar yang mengatur mereka, organ konsultatif, dan sekretariat yang permanen (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:183-184). Sedangkan menurut Clive Archer, organisasi internasional menjadi suatu struktur formal, berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan diantara anggota-anggotanya yang terdiri dari pemerintah maupun non-pemerintah yang berjumlah lebih dari dua negara merdeka memiliki tujuan mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya. Peran organisasi internasional menurut Clive Archer (2001:68) adalah sebagai berikut:

1. Instrumen (alat/sarana), organisasi internasional merupakan instrumen yang digunakan oleh para anggotanya untuk tujuan tertentu, mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik jika terjadi dan menyalurkan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), organisasi internasional adalah sebagai arena atau forum, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat, bekerja sama untuk membuat keputusan dalam perumusan perjanjian-perjanjian internasional. Arena itu sendiri bersifat netral, mereka dapat digunakan untuk berkonsultasi, berdiskusi, atau berdebat.

3. Aktor, organisasi internasional sebagai aktor atau pelaku independen yang dapat bertindak sebagai organisasi internasional dan bukan sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

UNICEF termasuk kedalam jenis organisasi yang didirikan untuk menangani fungsi-fungsi khusus. Fungsi dan tujuan dari UNICEF adalah untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak dan masyarakat dunia serta memajukan pendidikan karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan mendukung pembelajaran berkualitas untuk setiap anak baik perempuan maupun laki-laki di seluruh dunia, terutama mereka yang paling terancam dan berisiko tertinggal.

Konsep Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia agar dapat eksis dan berkualitas. Namun pada dasarnya manusia yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa adanya pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih melalui penerapan sistem pendidikan nasional. Menurut UNICEF (2000), pendidikan yang baik dimulai dari murid-murid yang sehat dan bergizi baik, yang siap untuk berpartisipasi dan belajar, serta mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat. Kedua, lingkungan yang sehat, aman, protektif, dan peka terhadap gender, dengan sumber daya dan fasilitas yang cukup. Ketiga, isi kurikulum dan sumber daya yang tepat untuk pembelajaran kemampuan membaca dan berhitung dasar, serta pemahaman di bidang-bidang seperti gender, kesehatan, gizi, pencegahan HIV/AIDS, dan perdamaian. Keempat, proses di mana para guru terlatih menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa dan penilaian yang terampil di kelas dan sekolah yang dikelola dengan baik untuk mendukung pembelajaran dan menghapus ketidaksetaraan. Kelima, hasil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan keterlibatan masyarakat yang konstruktif.

Menurut Edward Sallis (2005:2) kualitas pendidikan memiliki kriteria maupun indikator antara lain:

1. Guru-guru yang luar biasa
2. Nilai-nilai moral/karakter yang tinggi
3. Hasil ujian yang sangat baik
4. Dukungan dari orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat
5. Sumber daya yang melimpah
6. Penerapan teknologi terkini
7. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi)
8. Kepedulian terhadap para siswa
9. Kurikulum yang seimbang dan relevan.

Selain memiliki indikator terhadap kualitas pendidikan, Edward Sallis menyamakan kualitas pendidikan sama dengan kepuasan pelanggan, yang muncul karena sebuah bentuk tanggung jawab dalam persaingan dunia pendidikan global sehingga muncul kebutuhan untuk menunjukkan akuntabilitas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, mendeskripsikan peran UNICEF dalam peningkatan kualitas pendidikan di Papua selama 2020-2021. Sumber data berupa data primer yang diambil dari dokumen dan laporan dari UNICEF, dan juga menggunakan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal serta situs internet yang berkaitan dengan peran UNICEF di Papua, dan kualitas pendidikan di Papua. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan melalui telaah pustaka atau *literature review*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga pada melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Papua

Kondisi Pendidikan di Papua merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, dimana permasalahan pendidikan di Papua berhubungan dengan berbagai faktor yang membuat pendidikan sangat tertinggal. Salah satu hal ini, yang menyebabkan jarang ditemui Orang Asli Papua (OAP) menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan atau melanjutkan sekolah tinggi, hal ini berhubungan dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan yang tinggi, persoalan rendahnya kualitas tenaga kerja dan angka pengangguran. Selain itu, kualitas pendidikan masih menjadi masalah besar, dengan hanya 40% siswa sekolah dasar yang memenuhi standar minimal nasional dalam hal membaca dan 16% dalam hal matematika, yang menempatkan mereka di belakang banyak provinsi lain (UNICEF, 2019). Provinsi Papua telah mengambil langkah positif untuk memperluas akses pendidikan namun, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendidikan di Papua sehingga terjadi kesejangan kualitas pendidikan dengan daerah lain.

Faktor Penyebab Rendahnya Pendidikan di Papua

a. Kurikulum

Penerapan Kurikulum di Papua sejak tahun 2016 semua sekolah sudah mengadopsi kurikulum 2013 namun masih menggunakan pendekatan proses cara lama yaitu mengejar ketuntasan materi, kurikulum 2013 yang bersifat saintifik, intergratif dan tematik berbasis pada pengembangan penguasa potensi anak belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh para guru. Sehingga, hal ini menyebabkan lemahnya proses belajar dan kualitas lulusan yang tidak mampu beradaptasi dan bersaing dalam tuntutan era global (KOMPAK, 2022:69). Karena Papua adalah wilayah yang sangat berbeda dalam hal letak geografis, budaya, dan sejarah, menerapkan kurikulum yang sama dengan kurikulum nasional akan sulit dilakukan. Tujuan pemerintah pusat adalah untuk mengembangkan kurikulum yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk bersaing dalam kualitas secara internasional; namun, Papua akan semakin tertinggal karena masalah akses pendidikan masih belum terselesaikan (kompas.id, 2022).

b. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan

Jumlah tenaga pengajar khususnya guru di Papua sangat minim, distribusi guru antar kabupaten dan antar kota yang tidak merata dimana daerah-daerah terpencil mengalami kondisi yang cukup sulit. selain itu, permasalahan kualitas guru menjadi salah satu persoalan pendidikan di Papua masih banyak guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan kedisiplinan kehadiran guru saat mengajar juga menjadi persoalan. Penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 terhadap guru yang tidak menjalankan tugasnya atau *Teacher Absenteeism* di Papua mencapai 56% di daerah pedalaman dan terisolir. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan ACDP Kemendikbud pada tahun 2014 tingkat guru tidak menjalankan kewajibannya untuk mengajar di Papua adalah sebesar 37% dan untuk wilayah pegunungan, tingkat guru tidak menjalankan kewajiban untuk mengajar lebih tinggi yaitu sebesar 48% dan kepala sekolah tidak datang ke sekolah sebesar 70% (KOMPAK, 2022:26).

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembangunan pendidikan secara umum di Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana semestinya terutama di wilayah-wilayah perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan didapat sebuah fakta dimana kondisi berbanding terbalik, Pedalaman Papua masih diliputi sekian banyak keterbatasan. Menurut Dr. Gabriel Lele selaku sekretaris Gugus Tugas Papua mendapati bahwa masih banyak sekolah dibawah standar saran dan prasarana serta kondisi tidak layak pakai selain itu jarak yang relatif jauh antara pusat pemukiman dengan fasilitas pendidikan, kondisi ini ditemukan di wilayah Pedalaman Papua (gtpapua.ugm, 2019). Di Papua, jumlah sekolah, terutama sekolah menengah seperti SMA, SMK, dan SLB, masih sangat terbatas, terutama di Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, dan Dogiyai. Sementara itu, banyak lembaga pendidikan yang telah menerima akreditasi namun belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP).

d. Adat dan Budaya

Provinsi Papua merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan; kondisi topografinya bervariasi, meliputi dataran rendah, rawa-rawa, dan dataran tinggi, dengan jenis tanah yang terdiri dari hutan hujan tropis, padang rumput, dan padang alang-alang. Selain itu, Papua memiliki lanskap sosial-budaya yang kompleks, termasuk berbagai macam adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan sistem mata pencaharian. Adanya perbedaan tersebut, menyebabkan perbedaan terhadap cara pandang para ahli dalam membagi kawasan pembangunan di Papua atas beberapa komunitas. Fredy Numberi (2008) membagi kawasan di Papua berdasarkan mata pencaharian dan kesamaan nilai sosial-budaya, mengklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Penduduk pesisir pantai dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, berkebun dan meramu sagu.
2. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah, dengan mata pencaharian meramu sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, dan berburu di hutan.
3. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah, dengan mata pencaharian bercocok tanam umbi-umbian dan memelihara babi sebagai ternak utama, berburu hewan dan memetik hasil hutan.

Sedangkan, James Modouw (2013) mengelompokkan pembagian masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya dan sosial ekonomi di satu sisi, dan sosial ekonomi di sisi lainnya, yaitu: Pendekatan Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi terbagi atas masyarakat tradisional, pra modern dan modern, sementara pendekatan sosial ekonomi terbagi atas masyarakat petani ladang, nelayan dan peramu.

Dampak Rendahnya Pendidikan di Papua

a. Tingkat Buta Huruf

Kondisi kemampuan membaca di Indonesia masih terdapat sebanyak 2,9 juta masyarakat yang belum melek huruf dan Provinsi Papua menjadi penyumbang buta huruf terbesar lebih dari 500 ribu penduduk mengalami buta huruf (Media Indonesia, 2021). Berdasarkan data BPS, Papua menjadi provinsi dengan angka buta huruf paling tinggi di Indonesia, untuk usia 15 keatas tahun pencapaian buta huruf pada tahun 2020 sebesar 22.10% lalu pada tahun 2021 mencapai 21.11% terjadi sedikit penurunan persentase penduduk yang mengalami buta huruf namun masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Barat 12.61%, Sulawesi Barat 6.91%, Nusa Tenggara Timur 6.15% dan Kalimantan Barat 6.59% sedangkan untuk tingkat buta huruf nasional mencapai 3.96%. Untuk tingkat buta huruf usia 15-44 tahun di Papua masih relatif tinggi pada tahun 2020 angka buta huruf mencapai 20.38% dan pada tahun 2021 sebesar 19.03%, dari tahun 2020 hingga 2021 persentase penduduk yang mengalami buta huruf sedikit penurunan. Untuk usia 45 tahun keatas tingkat buta huruf pada tahun 2020 mencapai 26.95% dan ditahun 2021 mencapai 26.28% untuk kategori usia, tingkat buta huruf di usia 45 tahun keatas merupakan usia tertinggi yang mengalami buta huruf dibandingkan usia 15 tahun keatas dan usia 15-44 tahun.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024. Pada tahun 2024, menargetkan RLS untuk penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,18 tahun. Berdasarkan BPS, rata-rata lama sekolah penduduk Papua usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 mencapai 6.96 kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 mencapai 7.04 tahun atau setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka ini menunjukkan bahwa perkembangan RLS Papua masih belum mencapai target RPJM dan Program Wajib Belajar 12 tahun belum berjalan optimal (BPS, 2021).

c. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Pada tahun 2020, APK SD/ sederajat di Provinsi Papua mencapai 91,27%, sementara capaian APK SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing mencapai 81,24% dan 76,55%. Dan di tahun 2021, APK SD/ sederajat terjadi peningkatan mencapai 93.07%, sementara capaian APK SMP/ sederajat terjadi peningkatan mencapai 81.68% dan SMA/ sederajat mengalami penurunan mencapai 75.05%. Hal ini mengindikasikan partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. Pencapaian APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Di tahun 2020, hanya sekitar 80 % penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu 7-12 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, tidak terlihat adanya perbedaan yang cukup tajam pada capaian APM antara laki-laki dan perempuan, meskipun capaian APM laki-laki cenderung sedikit lebih tinggi daripada perempuan hampir di seluruh jenjang pendidikan.

d. Angka Putus Sekolah

Rendahnya akses pendidikan di Papua juga ditandai oleh tingginya angka putus sekolah. Angka putus sekolah di Propinsi Papua mencapai 1,83 menjadikan tertinggi kedua di Indonesia rendahnya angka putus sekolah ini menyiratkan bahwa mereka yang telah mampu mengakses pelayanan pendidikan pun masih rentan untuk terlempar dari pendidikan formal (Kemendikbud, 2018). Angka putus sekolah paling banyak berada di kabupaten di pegunungan tengah Papua seperti Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Deiyai, Intan Jaya dan Puncak. Di tengah upaya pemerintah sejak tahun 2013 telah mencanangkan gerakan anti putus sekolah, dengan angka lama sekolah yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi (BPS, 2020)

e. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia

Selain kuantitas dan kualitas sekolah, kurangnya tenaga pendidik atau guru yang berkualitas untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Konflik antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masyarakat lainnya, di sisi lain, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan pendidikan (CNN, 2021). Faktor pendidikan, menjadi salah satu penyebab utama rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator utama keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Berdasarkan data IPM dari tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura merupakan daerah yang memiliki IPM sangat tinggi dengan hasil pertumbuhan mencapai 80,11% kemudian Mimika dengan hasil pertumbuhan mencapai 74,48%, Biak Numfor dengan hasil pertumbuhan mencapai 72,33%, Jayapura dengan hasil pertumbuhan mencapai 70,49% dan Merauke dengan hasil pertumbuhan mencapai 70,49% merupakan daerah dengan kategori IPM tinggi. Sedangkan, Nduga merupakan daerah dengan IPM terendah di Provinsi Papua dengan hasil pertumbuhan mencapai 32,84%.

Upaya Pemerintah Daerah

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua untuk meningkatkan pendidikan antara lain: *pertama*, dengan memberikan Beasiswa kepada pelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Beasiswa yang diberikan seperti Beasiswa Otsus, Beasiswa Unggul Papua dan Beasiswa Vokasi Jepang (bpsdm.papua, 2020). *Kedua*, melalui Program Sekolah Penggerak merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di daerah, termasuk di Provinsi Papua (kompas.id, 2022). *Ketiga*, Penyelenggaraan pendidikan berpola sekolah satu atap di Papua diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Satu Atap. Terdapat beberapa sekolah satu atap di Papua, seperti SMP Satu Atap Kanda di Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura dan SMA Satu Atap Papua Nasional Plus School di Kota Jayapura (kemdikbud.go.id, 2019). *Keempat*, melalui program Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM), Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelayanan pendidikan lanjutan sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas bagi orang asli Papua (papua.antaranews.com, 2022).

Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pendidikan di Papua. Beberapa masalah yang perlu diatasi antara lain kapasitas, kompetensi, distribusi, dan kekurangan guru selain itu kemampuan literasi dan numerasi di Papua juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih konkret dari pemerintah untuk terus memperbaiki pendidikan di Papua

UNICEF di Papua

United Nations International Children's Fund yang selanjutnya disebut UNICEF merupakan salah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946, dengan tujuan memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, perlindungan, dan pendidikan. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah luar negeri dan beberapa lembaga swadaya untuk membangun pendidikan anak-anak di Papua, dan juga telah meluncurkan program-program di Papua untuk meningkatkan pendidikan, akses informasi tentang kesehatan dan higienis menstruasi, serta dukungan pada pengembangan dan nutrisi anak. UNICEF memiliki beberapa program di Papua yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan meningkatkan kesejahteraannya. Program pendidikan, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. sejak tahun 2019, UNICEF telah mengimplementasikan model literasi untuk kelas awal di daerah pedesaan dan terpencil di Papua. Selain itu, UNICEF memberikan pelatihan guru untuk membantu para guru memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas.

Program kesehatan, UNICEF mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Papua melalui program-program seperti imunisasi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta perbaikan fasilitas layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan puskesmas. Salah satunya ialah, Program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) yang dibentuk bersama Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2021 UNICEF juga menggelar lokakarya penanganan gizi buruk terintegrasi tingkat provinsi pada tahun 2022. Program perlindungan anak, melalui program ini UNICEF berusaha untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Kemudian membangun sistem perlindungan anak yang kuat dengan mengedepankan partisipasi aktif kelompok-kelompok masyarakat lokal. Program sosial ekonomi fokus pada pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga dapat membantu perekonomian keluarga serta meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Program-program tersebut bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, sejahtera dan berprestasi di Papua. Namun, UNICEF tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah dan masyarakat setempat.

Peran UNICEF dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Papua tahun 2020-2021

UNICEF melakukan peran sebagai aktor organisasi internasional dengan berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia khususnya di Papua. Salah satu program utama UNICEF adalah meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia dan Papua. Menurut UNICEF, hampir 70% dari semua anak berusia 15 tahun di Papua belum mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika. Penyebaran virus Covid-19 telah memperparah situasi ini, yang mengakibatkan penangguhan kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah pada bulan Maret 2020 (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, UNICEF membantu Pemerintah Indonesia mengurangi kesenjangan di sektor pendidikan di Provinsi Papua dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung anak-anak di kelas awal.

a. *Program rural and remote education initiative for Papuan Provinces*

Program rural and remote education initiative for Papuan Provinces atau Inisiatif program pendidikan daerah pedesaan dan terpencil di Provinsi Papua adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan dalam bidang pendidikan serta, meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak di daerah pedesaan dan terpencil di Provinsi Papua.

Program ini disusun dalam dua pilar yang dilaksanakan secara terkoordinasi. *Pilar pertama*, UNICEF menjalin kemitraan dengan Organisasi Masyarakat untuk mengelola kegiatan yang berbasis sekolah dan *pilar kedua*, melibatkan pejabat pemerintah dan anggota parlemen untuk memajukan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan lokakarya pelatihan bagi staf sekolah, masyarakat, dan pejabat pemerintah untuk terlibat membahas isu-isu yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran literasi. Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk menguji pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil literasi di kelas awal di daerah pedesaan dan terpencil di Provinsi Papua. Dengan dampak yang

diharapkan adalah peningkatan hasil belajar dalam membaca dan pemahaman di kelas awal karena peningkatan literasi adalah salah satu target utama dari program.

Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan untuk guru menguasai keterampilan dasar mengajar kepada siswa di kelas awal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas awal sekolah dasar terutama di pedesaan dan terpencil di Papua. Kegiatan yang dilakukan dalam program literasi kelas awal ini meliputi, pelatihan untuk pelatih, pelatihan bagi guru internal, rapat kelompok kerja guru setiap dua pekan, pelatihan bagi komite sekolah, pelatihan trimester untuk kelompok kerja kepala sekolah, pendampingan, kegiatan kampanye dan membangun pojok baca. Program ini dilaksanakan di 4 kabupaten di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika (UNICEF, 2021).

Implementasi program literasi kelas awal di daerah pedesaan dan terpencil di Provinsi Papua memberikan dampak yang baik pada tahun 2019, dengan jumlah anak yang tidak dapat membaca di sekolah-sekolah yang ditargetkan berkurang dari 62% menjadi 26%, sementara kompetensi membaca meningkat dari 6% menjadi 18%. Program literasi kelas awal meningkatkan kualitas pembelajaran 20.698 siswa dengan kemampuan 1.169 guru di tahun yang sama (UNICEF, 2019).

Pada tahun 2020, dunia terdampak penyebaran virus COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar dan pembelajar secara langsung harus ditutup sementara waktu hingga keadaan kembali membaik. UNICEF terus berupaya meningkatkan pendidikan di Papua dengan menyebarkan model literasi kelas awal yang diterapkan kepada dua daerah di Papua, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga bertambah sekolah-sekolah yang mereplikasi model literasi kelas awal untuk menjadikan upaya dalam meningkatkan kemampuan dasar siswa dan ditahun yang sama UNICEF meluncurkan Modul Elektronik (E-Modul) Pendidikan Keterampilan Hidup. E-Modul ini dirancang untuk guru sekolah menengah guna meningkatkan pengajaran keterampilan abad ke-21 kepada remaja, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi (UNICEF, 2020).

Dan pada tahun 2021, program literasi kelas awal mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebab, dianggap telah berhasil di jalan di kedua daerah di Provinsi Papua. Oleh karena itu, UNICEF mengubah rencana dan strategi perluasan program, serta memperbaiki modul pelatihan guru, yang kini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan guru UNIMUDA dan telah didistribusikan ke enam universitas lainnya (UNICEF, 2021).

b. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat

UNICEF berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau masyarakat dan para pengambil keputusan. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis agama, universitas, *think tank*, lembaga penelitian, organisasi berbasis komunitas, dan gerakan sosial merupakan beberapa mitra masyarakat sipil UNICEF, termasuk Yayasan Credo, Yayasan Literasi Anak Indonesia (YLAI), Yayasan Nusantara Sejati, dan *Room to Read*, serta kerja sama dengan *The Asian Foundation* dalam mendigitalkan buku-buku bacaan berjenjang melalui *platform daring Let's Read*. UNICEF menjalin kerjasama dengan berbagai Yayasan di Papua. Yayasan Rumsram yang berkedudukan di Kabupaten Biak Nufor untuk meningkatkan pendidikan anak. Pada tahun 2021 Yayasan Rumsram bersama dengan UNICEF membuka kegiatan Program Organisasi Penggerak (POP) baca tulis bagi 15 SD kepala sekolah dan guru di Kabupaten Biak Numfor (Papuapos.com,2021). Yayasan Berkat Lestari berkedudukan di Kota Jayapura Provinsi Papua dan berdiri sejak tahun 2015. Yayasan Berkat Lestari bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. UNICEF Papua berkolaborasi dengan Yayasan Berkat Lestari mendampingi para guru dan murid di SD Peduli Papua (tribunnews.com,2023).Yayasan Nusantara Sejati (YNS) untuk penguatan pembelajaran baca tulis kelas awal di Kabupaten Jayapura tahun 2020-2023.

Program literasi baca tulis kelas awal diterapkan di Papua untuk mendukung minat baca dan tulis bagi siswa terlebih dapa siswa sekolah dasar. Program ini di jalan di 16 sekolah di Jayapura selama tiga tahun YNS bersama UNICEF memberikan pendampingan kepada 146 guru untuk melatih komponen literasi baca tulis dan disiplin positif (fokuspapua.com,2023). Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua (YP2KP). Sembilan sekolah di Kabupaten Mimika telah menerapkan program literasi kelas awal secara mandiri. Setelah pelatihan yang dilakukan oleh

YP2KP pada bulan Agustus 2018, 9 sekolah menyatakan minatnya untuk mengimplementasikan program membaca di kelas awal. SD Torsina, SD Santa Maria, SD Ma'arif, SD Yosua, SD Yapis Al Furqon, SD Fertigo, SD Smirna, dan SD Mapurujaya adalah sekolah-sekolah yang secara mandiri melaksanakan program literasi. Setelah berkomitmen untuk membangun program literasi kelas awal, YP2KP memberikan pelatihan komponen literasi kepada para guru dan kepala sekolah dari sembilan sekolah tersebut, yang diselenggarakan di SD Torsina dan dihadiri oleh 63 peserta (yp2kp.org, 2020).

c. Dukungan dana bantuan

UNICEF telah menerima dana dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) untuk meluncurkan program pendidikan di daerah terpencil dan pedesaan untuk membantu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekurangan di sektor pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya Papua. UNICEF dan Indonesia membentuk inisiatif kemitraan 2021-2025 pada tahun 2021. Program kerja sama yang merupakan kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF ini berfokus pada penegasan kembali komitmen dan sinergi bersama untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak di Indonesia melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan dan gizi, air, sanitasi, dan higiene (WASH), perlindungan anak, serta penguatan kebijakan sosial. Program kerja sama dengan anggaran Rp 2,07 triliun tersebut juga sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*, dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework SDCF 2021-2025* (UNICEF, 2021).

Dana tersebut merupakan total dana keseluruhan yang disalurkan untuk membantu UNICEF menjalankan misinya untuk menjangkau setiap anak dan memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan berupa pendidikan, kesehatan dan perlindungan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Khusus untuk bantuan dana yang diberikan untuk memajukan pendidikan di Papua. Prudential Indonesia telah menyediakan pembiayaan untuk program literasi kelas awal sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 Prudential Indonesia memberikan bantuan sebesar Rp 2,9 miliar kepada UNICEF untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Bantuan ini memberikan manfaat bagi lebih dari 25.000 anak dan 1.500 pengajar di lebih dari 200 PAUD dan sekolah dasar, serta membantu UNICEF menjangkau 70.000 anggota masyarakat sekitar dengan informasi pencegahan virus (UNICEF, 2020).

KESIMPULAN

Kondisi pendidikan di Papua merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, dimana permasalahan pendidikan di Papua berhubungan dengan berbagai faktor yang membuat pendidikan sangat tertinggal. Oleh sebab itu, tingkat buta huruf di Papua masih relatif tinggi, rendahnya angka rata-rata lama sekolah, kurangnya angka partisipasi penduduk yang sedang bersekolah, meningkatnya angka putus sekolah, keadaan ini membuat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah mendorong pendidikan Papua, namun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. UNICEF melakukan perannya sebagai aktor organisasi internasional dengan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesenjangan di sektor pendidikan di Provinsi Papua melalui Program *rural and remote education initiative for Papuan Provinces* bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan dalam bidang pendidikan serta, meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak di daerah pedesaan dan terpencil di Provinsi Papua dengan program utama yaitu Program Literasi Kelas Awal merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa di kelas awal kelas 1 sampai dengan 3 sekolah dasar. Melalui program ini, para guru mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar yang diberikan oleh UNICEF bersama kemitraan dengan organisasi masyarakat hingga saat ini masih berjalan dengan baik, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Wijatmadja, S. 2016. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Malang: Intrans Publishing
- Archer, Clive. 2001. International Organizations Third edition. London : Routledge, Taylor & Francis e-Library
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua. Terdapat di <https://bpsdm.papua.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2022. Angka Buta Huruf di Indonesia
- Bakry, U. Suryadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- BPS Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2020-2022. Tersedia di <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>
- Defining Quality in Education. Tersedia di https://www.right-to-education.org/sites/righttoeducation.org/files/resourceattachments/UNICEF_Defining_Quality_Education_2000.PDF
- Gea, Herlina., Mataputun, Yulius., Tanta, Cornelius. 2022. Implementasi Gerakan Literasi Membaca Di SD Inpres Dabolding Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Jurnal Pengelolaan Pendidikan, 3(1): 128-137
- Masih Ada 2,9 Juta Orang Buta Aksara di Indonesia. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/humaniora/430374/masih-ada-29-juta-orang-buta-aksara-di-indonesia>
- Modouw, James. 2013. Pendidikan dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial. Yogyakarta: Bajawa Press
- Numberi, Freddy. 2008. Keajaiban Pulau Owi: Mutiara Terpendam di Wilayah Tanah Papua. Jakarta: Gibon Books
- Pemprov Papua Tingkatkan SDM Melalui Berbagai Program Pendidikan. Terdapat di <https://papua.antaranews.com/berita/687465/pemprov-papua-tingkatkan-sdm-melalui-berbagai-program-pendidikan>
- Pratiwi, Indah. 2019. Efek Program PISA Terhadap Kurikulum di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(1): 51-71
- Rural and remote education initiative for Papuan Provinces - Programme overview.pdf. Terdapat di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2066/file/Rural%20and%20remote%20education%20initiative%20for%20Papuan%20Provinces%20-%20Programme%20overview.pdf>
- Safitri, O. A., Yuniarti, D. V., Rostika, D. 2022. Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Basicedu, 6 (4): 7096-7106
- Sallis, Edward. 2005. Total Quality Management in Education. USA : Taylor & Francis e-Library
- Sapardan, A. Dadang. 2020. Pendidikan di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0. Bandung: NewsRoom
- Sekolah Bergerak Untuk Memulihkan Pendidikan di Papua. Terdapat di <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/15/pemulihan-pendidikan-terus-diupayakan-sekolah>
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua 2020. Tersedia di <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/23/8838aec3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua 2021. Tersedia di <https://papua.bps.go.id/publication/2022/12/28/1601bc8ea9698cce70259d67/statistik-kesejahteraan-rakyat-provinsi-papua-2022.html>
- Sumule, A. Irianto., Moudow, J., Bauw, L., Sidik, M., Nurkholis. Chalil, T. M. 2022. Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Pada Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat. KOMPAK. ISBN 978-623-6080-53-3
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI12). Tersedia di <https://www.bps.go.id/news/2012/05/28/6/survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia-2012--sdi12-.html>

- Triyono, Urip. 2019. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan (Formal, Non Formal, dan Informal)*. Yogyakarta: Deepublish
- UNICEF Kompendium Praktik Baik. Tersedia di <https://www.unicef.org/indonesia/media/11766/file/Kompendium%20Praktik%20Baik.pdf>
- UNICEF Laporan Tahunan 2019. Tersedia di <https://www.unicef.org/indonesia/media/4611/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202019.pdf>
- UNICEF Laporan Tahunan 2020. Tersedia di <https://www.unicef.org/indonesia/media/9971/file/Laporan%20Tahunan%202020%20UNICEF%20Indonesia.pdf>
- UNICEF Laporan Tahunan 2021. Tersedia di <https://www.unicef.org/indonesia/media/13816/file/Laporan%20Tahunan%202021%20-%20Single%20page.pdf>
- Worabay, M.G. 2018. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(59)